** FRAKSI NASDEM–PSI–PD**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688, 560293 Fax. 580692



**PEMANDANGAN UMUM** **FRAKSI NASDEM-PSI-PD**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**PENJELASAN GUBERNUR**

**TENTANG**

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

 **TAHUN ANGGARAN 2021**

**(BAHAN ACARA NO. 15 TAHUN 2022)**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD DIY**

**PADA HARI : JUMAT, 17 JUNI 2022**

*Assalaamu’alaikum Wr. Wb.*

*Selamat siang dan Salam sejahtera untuk kita semua*

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Jajaran Pimpinan Dewan

Yth. Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sdr. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sdr. FORKOMPINDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asekda, dan seluruh jajarannya.

Yth. Rekan-rekan wartawan dan para hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunianya kepada kita semua, maka sepantasnya kita menghaturkan puji dan syukur kehadhiratNya, pada hari ini Jumat tanggal 17 Juni 2022, kita tetap diberikan kesehatan yang prima dalam mengikuti Rapat Paripurna untuk Penyampaian Pemandnagan Umum Fraksi-fraksi di DPRD DIY terhadap terhadap Penjelasan Gubernur tentang *“ Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2021”.*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY TA. 2021 ini disusun dan disajikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah. Hal ini juga merupakan wujud dari otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta sebagai implementasi atas penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Instrumen hukum tersebut, merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk penyusunan dan penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. DIY TA 2021, yang sekaligus merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun ***Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*** yang transparan dan berdaya guna, bagi penyempurnaan kegiatan Pembangunan di masa-masa yang akan datang, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang bebahagia,

 Menanggapi Penjelasan/Penghantaran Gubernur DIY atas Raperda DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2021, maka perkenankan kami Fraksi NasDem-PSI-PD memberikan Pemandangan Umum Fraksi terkait beberapa hal sebagai berikut

1. **Pandangan Fraksi NasDem-PSI-PD**.

Pertanggungjawaban Meskipun Laporan Pelaksanaan APBD DIY TA. 2021 sudah mendapat respon dan penilaian WTP dari BPK meskipun ada catatan dari BPK.RI yang secara resmi telah diterima oleh DPRD.DIY dalam rapat paripurna tanggal 8 April 2022 yang lalu, dimana kami semua apresiasi kepada Pemda DIY yang telah berturut-turut mendapatkan keduabelas kalinya WTP dari BPK. RI.

Mengacu pada aturan dasar akuntansi publik dan pemerintahan, namun penilaian aspek politis juga tak kalah pentingnya. Hal ini yang berhak memberikan penilaiannya adalah DPRD DIY. Dari Laporan pertanggungjawaban APBD DIY TA.2021 yang telah dipaparkan oleh Sdr. Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD DIY pada tanggal 16 Juni 2022, telah memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, sekaligus sebagai pemetaan atas *keberlangsungan Pembangunan* di DIY paling tidak dalam kurun waktu 4 tahun yang lampau (2021). Kami mencatat, dalam Laporan tertulis tersebut, *tidak menemukan informasi*  *tentang Penyimpangan maupun* *hambatan-hambatan* yang ditemui dilapangan selama pelaksanaan APBD DIY 2021 atau kata lain APBD DIY tahun 2021 *berjalan mulus* sesuai rencana meski masih dalam situasi keprihatinan bersama akan Pandemi Covid.19. Namun demikian, Fraksi kami berkeyakinan dalam pelaksanaannya pasti banyak menemukan kendala yang *tidak ringan*. Kedepan Fraksi kami berpandangan, sebaiknya hal-hal yang menjadi *hambatan utama* dalam pelaksanaan Anggaran, harus dilaporkan secara faktual dalam laporan Pertanggungjawaban oleh Gubernur DIY, supaya DPRD dapat memahami secara utuh dan proporsional atas berbagai hambatan yang ditemui dilapangan. Jadi, Pemerintah Daerah tidak hanya melaporkan dalam *perangkaan semata, tapi juga ada narasi-narasi penting tentang hambatan yang terjadi dilapangan, harus diberikan tempat dan ruang yang proporsional untuk dilaporkan*

1. **Pendapat, Fraksi NasDem-PSI-PD*.***

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY TA. 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022.

Dari seluruh paparan penjelasan APBD DIY TA. 2021, Fraksi NasDem-PSI-PD berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan APBD DIY TA 2021 capaiannya telah mendekati skala prioritas yang telah disepakati*.* Maka dalam konteks ini, pendapat Fraksi kami, sebaiknya Pemerintah Daerah DIY sebelum menyajikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahunan ini, dalam pemaparan perangkaan sedapat mungkin *juga memberikan keterkaitan*dengan skala prioritas dan tema sentral yang telah ditetapkan sebagai komitmen Pembanguna, Daerah, karena *essensi politis* APBD, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang bermuara akhir pada *kesejahteraan masyarakat.*

1. **Harapan Fraksi NasDem-PSI-PD.**

Dalam menyampaikan format Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY TA. 2021, untuk masa akan datang *kami berharap* kepada Pemerintah Daerah DIY, dari Raperda APBD DIY 2021, tentang lampiran Laporan Kinerja, hendaknya disertakan juga indikator capaian anggaran, agar sesuai dengan skala prioritas pembangunan, harapannya masyarakat luas pun dapat mengetahui atau mengakses informasi dengan mudah atas capaian APBD DIY setiap tahunnya. Fraksi kami menilai Jawaban sdr. Gubernur DIY tahun 2021, khususnya tentang Laporan *Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan* Tahun Anggaran 2021, sebaiknya *disesuaikan* dengan regulasi yang ada, tentang pengelolaan anggaran yang selama ini sudah kita jalankan.

1. **Saran dan Usul Fraksi NasDem-PSI-PD**,

Berpijak dan merujuk pada finalisasi-harmonisasi Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY TA. 2021 dan hal-hal yang kami uraikan dimuka, maka dengan ini, Fraksi NasDem-PSI-PD menyatakan: **SETUJU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DIY TAHUN ANGGARAN 2021, DITERIMA DAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**.

*Para hadirin yang terhormat,*

Demikian Pemandangan Umum Fraksi NasDem-PSI-PD terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2021 (bahan acara Nomor 15 tahun 2022). Dengan harapan Pemandangan Umum Fraksi ini, menjadi masukan dan catatan bersama untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan. Bila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi ini, kami menghaturkan maaf dan terimakasih.

***Wassalamu’alaikum Wr. Wb.***

 **Yogyakarta, 17 Juni 2022**

|  |
| --- |
| **FRAKSI NASDEM-PSI-PD****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** |
|  | **Juru Bicara**H. Muhammad Yazid, S.Ag. |
|  |  |
| Ketua**Ir. H. Widi Sutikno, M.Si.** | Sekretaris**H. Muhammad Yazid, S.Ag.** |